

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-2019

H.Sasongko , A.F. Ilmiyono , Z.H. Aldillah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor
agung.fajar@unpak.ac.id, zhafirahuriya14@gmail.com

Abstract

Economic growth as an increase in community output caused by the increasing number of production processes without any changes in the methods or technology itself. There are four factors of economic growth, namely human resources, natural resources, capital formation, and technology. Government spending acts as capital formation as the provision of public facilities, but without these public facilities the private sector will not want to invest. The purpose of this study was to examine (1) The Effect of Government Spending on Education on Economic Growth in West Java Province (2) The Effect of Government Spending on Health on Economic Growth in West Java Province (3) The Effect of Simultaneous Government Expenditure on Education and Health on Economic Growth in West Java Province. This research was conducted in cities/districts in West Java Province in 2016-2019. The sample used in this study were 11 cities/districts. The sample was selected using purposive sampling method. This type of research is verification using the explanatory survey method, which is the method used to test the hypothesis. The data were tested using Eviews 8 with panel data model selection, classical assumption testing using normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test, panel data regression analysis, and hypothesis testing using t test, f test, and R² test. Partial testing with the t-test shows that government spending on education is positive and has no significant effect on economic growth, this is due to the government's less than optimal effort in absorption budget allocations in West Java Province. Government spending in the health sector has a positive and significant effect on economic growth, so that the government's efforts have been maximized in the absorption of budget allocations in West Java Province. Simultaneous test results with the f test, namely government spending on education and health together have a positive and significant effect on economic growth in West Java Province.

Keywords: *Economic Growth., Government Spending on Education, Government Spending on Health.*

Abstrak

Pertumbuhan Ekonomi sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya proses produksi tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Ada empat faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan sebagai pembentukan modal sebagai penyediaan fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini pihak swasta tidak akan mau untuk menanamkan modalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat (2) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat (3) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan

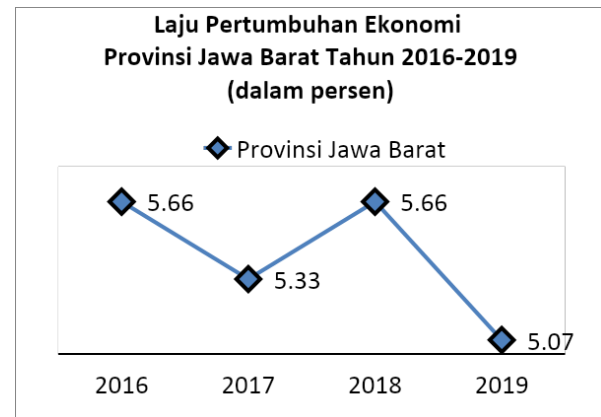
secara simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 11 kota/kabupaten. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis penelitian ini bersifat *verifikatif* dengan menggunakan metode *explanatory survey*, yaitu metode yang digunakan untuk menguji hipotesis. Data diuji dengan menggunakan *Eviews 8* dengan pemilihan model data panel, pengujian asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t, uji f, dan uji R^2 . Pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil pengeluaran pemerintah bidang pendidikan positif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam penyerapan alokasi anggaran di Provinsi Jawa Barat. Pada pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga upaya pemerintah telah maksimal dalam penyerapan alokasi anggaran di Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian secara simultan dengan uji f yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya (Sukirno, 2016). Menurut Boediono (dalam Putri, 2019) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut Bank Indonesia, PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk terpadat di antara provinsi lainnya. Provinsi Jawa Barat tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan yaitu adanya masalah pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian di Provinsi Jawa Barat

terlihat adanya laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Berikut gambar 1 menunjukkan laju PDRB atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.



Sumber: www.jabar.bps.go.id

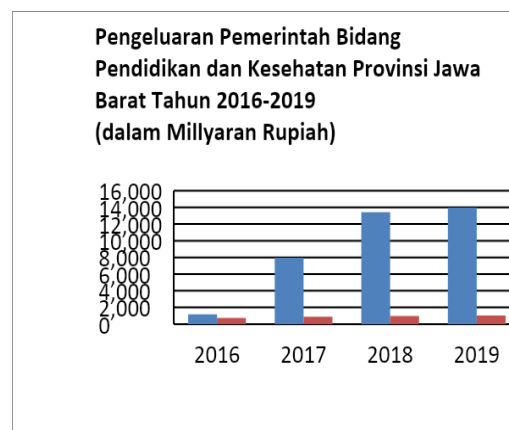
Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019

Grafik pada gambar tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2016-2019 mengalami fluktuatif. Laju pertumbuhan terendah di Jawa Barat terdapat pada tahun 2019 sebesar 5,07%, sedangkan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat terdapat pada tahun 2016 dan 2018 sebesar 5,66%. Pada tahun 2016-2017 laju pertumbuhan di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,33%, sedangkan pada tahun 2017-2018 laju pertumbuhan di Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Namun, pada tahun 2018-2019 laju pertumbuhan di Jawa Barat terjadi penurunan kembali sebesar 0,59%.

Menurut (Samuelson dan Nordhaus, 2018), ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan teknologi. Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana yang umumnya menjadi *Social Overhead Capital* (SOC) dalam pertumbuhan

ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Menurut (Mankiw N dan dkk, 2018), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Menurut (Todaro dan Smith, 2018), pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal pokok untuk mencapai kehidupan yang layak, karena pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah tentunya memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan ekonomi dengan melakukan kebijakan. Salah satu dari kebijakan pemerintah yaitu kebijakan fiskal. Menurut (Putri, 2019), kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional, sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka

menstabilkan harga, tingkat output dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat melakukan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan tentunya menjadi salah satu hal yang sangat penting. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan diukur oleh anggaran belanja pendidikan dan kesehatan yang dialokasikan ke setiap daerah. Berikut gambar 2 yang menggambarkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Gambar 2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019

Berdasarkan gambar 2, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan selama empat tahun selalu mengalami pertumbuhan yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahunnya. Dengan terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019 menunjukkan situasi yang baik. Namun, peningkatan pengeluaran pemerintah

bidang pendidikan dan kesehatan ini tidak diikuti atau tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi. Seharusnya jika pengeluaran pemerintah selalu meningkat maka pertumbuhan ekonomi pun harus selalu meningkat. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Jawa Barat yaitu, belum terserapnya anggaran bidang pendidikan dan kesehatan secara merata pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat dan alokasi penyerapan anggaran bidang pendidikan dan kesehatan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Tentunya dengan adanya permasalahan ini dapat memperlambat pembangunan ekonomi suatu daerah guna melayani kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian ini adalah:

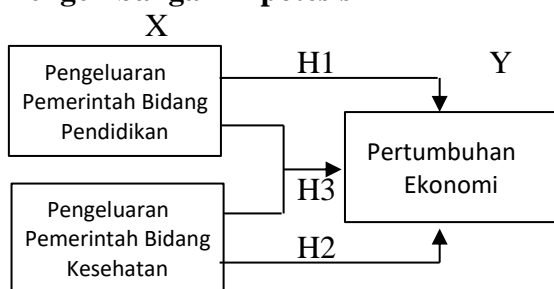
1. Untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.
2. Untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.
3. Untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.

Berdasarkan Teori Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y=C+I+G+(X-M)$ formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional

sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah, dengan membandingkan dan mengamati G terhadap Y dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional menurut Dumaury (dalam Putri, 2019). Menurut Hukum Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut sebagai *Wagner Law of Increased Government Activity*. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, USA, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri ataupun hubungan industri dengan masyarakat yang menjadi rumit dan kompleks. Selain itu, didukung oleh Teori Peacock dan Wiseman. Teori ini menyatakan bahwa pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain, masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak dinaikkan secara terus menerus. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk

memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang (Mangkoesoebroto, 2018). Oleh karena itu, apabila pengeluaran pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya maka harus diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Pengembangan Hipotesis



Gambar 3 Kerangka Pemikiran

Hipotesis 1

Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai bentuk investasi pemerintah dalam memperbaiki perekonomian negara. Pengeluaran di bidang pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut teori *human capital*, menyatakan bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat yang berproduktivitas tinggi. Investasi pendidikan mutlak sangat dibutuhkan, maka dari itu pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Tingginya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mampu meningkatkan sarana dan sistem pendidikan yang dapat

meningkatkan kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat yang semakin baik akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam mendorong kegiatan perekonomian dan mampu meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara. Hipotesis ini didukung oleh penelitian (Ladung, 2018) dan (Tjodi, Rotinsulu dan Kawung, 2018) yang menyatakan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis 2

Pengeluaran di bidang kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan bahwa alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak akan menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, semakin tinggi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan maka semakin baik sarana prasarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian yang mampu

meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara. Hipotesis ini didukung oleh penelitian (Puspitasari, Sarfiah dan Rusmijati, 2018) dan (Anggraeni, 2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis 3

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pemerintah tentunya memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan ekonomi dengan melakukan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Salah satu bagian dari kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah yang dapat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan tentunya menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagai tujuan pembangunan ekonomi. Selain itu, didukung dengan Teori Peacock dan Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Wiseman bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat maka harus diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis ini didukung oleh penelitian (Rahmawati, 2019) dan (Septiani, 2019) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat *verifikatif* dengan menggunakan metode *explanatory survey*, yaitu metode yang digunakan untuk menguji hipotesis. Unit analisis yang digunakan yaitu *geografic region*, sehingga penelitian ini dilakukan pada kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019 karena berasal dari respon suatu pemerintah. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 11 kota/kabupaten. Sampel dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling* yang dipilih berdasarkan kriteria. Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari www.jabar.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id. Data diuji dengan menggunakan *Eviews 8* dengan pemilihan model data panel, pengujian asumsi klasik, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X ₁)	- Realisasi Belanja Bidang Pendidikan		Rasio
Keterangan:			
Y = Pendapatan Nasional			
C = Konsumsi Rumah Tangga			
I = Investasi Domestik Swasta Bruto			

		$G = \text{Pengeluaran Pemerintah}$ $X = \text{Ekspor}$ $M = \text{Impor}$	Rasio/Ordinal
	- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	- Membandingkan target dan realisasi anggaran	
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X ₂)	- Realisasi Belanja Bidang Kesehatan	Keterangan: $Y = \text{Pendapatan Nasional}$ $C = \text{Konsumsi Rumah Tangga}$ $I = \text{Investasi Domestik Swasta Bruto}$ $G = \text{Pengeluaran Pemerintah}$	Rasio
	- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	- Membandingkan target dan realisasi anggaran	Rasio/Ordinal
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	$R(t-1,t) = \text{Laju Pertumbuhan Ekonomi}$ $\text{PDRB}_t = \text{PDRB tahun ini}$ $\text{PDRB}_{t-1} = \text{PDRB tahun sebelumnya}$	Rasio
	- Pendapatan Riil Perkapita		

Sumber : data diolah penulis, 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Uji Kesesuaian Model

1. Uji Chow

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	31.685309	(10,31)	0.0000
Cross-section Chi-square	106.382893	10	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 8, 2021

Uji Chow adalah untuk menentukan uji mana di antara kedua metode yakni metode *common effect* dan metode *fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Berdasarkan tabel 2 bahwa hasil uji chow menunjukkan nilai probabilitas F dan *Chi-square* < 0,05, yaitu sebesar 0,0000 artinya model *fixed effect* yang tepat digunakan untuk mengestimasi data panel dibandingkan dengan menggunakan model *common effect*.

2. Uji Hausman

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.033735	2	0.0066

Sumber: Data diolah dengan Eviews 8, 2021

Uji Hausman yaitu untuk menentukan uji mana di antara kedua metode *random effect* dan metode *fixed effect* yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel. Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel 3 diperoleh bahwa nilai probabilitas < 0,05 yaitu sebesar 0,0066. Nilai probabilitas < 0,05 yang berarti bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *random effect*, sehingga untuk uji hausman dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.814886
X2	0.814886	1.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 8, 2021

Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah multikolinearitas dengan melihat nilai variabel independen kurang dari 0,9. Berdasarkan pada tabel 4 bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) sebesar 0,814886 dan nilai variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar 0,814886. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah

multikolinearitas karena semua nilai koefisien korelasi antara variabel independen bernilai kurang dari 0,9.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/25/21 Time: 15:53
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 44

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob
X1	-0.000185	0.000141	-1.310532	0.1973
X2	9.45E-05	0.000310	0.305021	0.7619
C	0.602848	0.085310	7.066575	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 8, 2021

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu data dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas dari variabel independen adalah lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel 5 bahwa hasil nilai probabilitas dari kedua variabel independen yaitu X1 sebesar 0,1973 dan X2 sebesar 0,7619, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini karena hasil dari variabel independen lebih besar dari 0,05.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

		Mean dependent var	
R-squared	0.916410	var	15.51318
Adjusted R-squared	0.884053	S.D. dependent var	1.903652
S.E. of regression	0.648212	Akaike info criterion	2.211509
Sum squared resid	13.02555	Schwarz criterion	2.738656
Log likelihood	-35.65320	Hannan-Quinn criter.	2.407001
F-statistic	28.32162	Durbin-Watson stat	1.648935
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 8, 2021

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan lain pada model regresi. Berdasarkan tabel 6 bahwa hasil uji DW menunjukkan nilai sebesar 1,6489 dan diketahui nilai DU sebesar 1,6044 maka $4-DU=4-1,6044=2,3956$. Hal ini menunjukkan $DU < DW < (4-DU)$ atau $1,6044 < 1,6489 < 2,3956$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7 Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.000111	0.000451	0.247111	0.8065
X2	0.003420	0.000970	3.524963	0.0013
C	14.15563	0.252050	56.16201	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 8, 2021

Dimana:

Y_{it} = Variabel Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi untuk
Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan

X_1 = Variabel Pengeluaran
Pemerintah
Bidang Pendidikan

β_2 = Koefisien regresi untuk
Pengeluaran Pemerintah Bidang
Kesehatan

X_2 = Variabel Pengeluaran
Pemerintah
Bidang Kesehatan

i = Wilayah ke- i

t = Tahun ke- t

ε = Error

Interpretasi dari persamaan model regresi data panel di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 14,15563. Artinya, jika variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan nilainya adalah nol, maka nilai variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi nilainya positif yaitu sebesar 14,15563.

2. Koefisien Regresi Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan bernilai positif, yaitu sebesar 0,000111. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki hubungan yang searah dengan pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,000111. Koefisien bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

3. Koefisien Regresi Variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan bernilai positif, yaitu sebesar 0,003420. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengeluaran

pemerintah bidang kesehatan sebesar satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 0,003420. Koefisien pengeluaran pemerintah bidang kesehatan bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

0,0013, artinya nilai probabilitas < 0,05 yang berarti $H_{0.2}$ diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan secara parsial positif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.000111	0.000451	0.247111	0.8065
X2	0.003420	0.000970	3.524963	0.0013
C	14.15563	0.252050	56.16201	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 8, 2021

Uji t yaitu untuk menguji hubungan regresi secara parsial dan pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen berdasarkan tingkat signifikan. Berdasarkan tabel 8 bahwa hasil nilai probabilitas dari masing-masing variabel yaitu variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar 0,8065, artinya nilai probabilitas > 0.05 yang berarti $H_{0.1}$ ditolak dan variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar

2. Uji Koefisien Regresi (Uji F)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

	Mean dependent	
R-squared	0.916410	var 15.51318
Adjusted R-squared	0.884053	var 1.903652
S.E. of regression	0.648212	Akaike info 2.211509
Sum squared resid	13.02555	Schwarz 2.738656
Log likelihood	35.65320	Hannan-Quinn criter. 2.407001
F-statistic	28.32162	Durbin-Watson stat 1.648935
Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Data diolah dengan Eviews 8, 2021

Koefisien regresi yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Berdasarkan tabel 9 bahwa hasil nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0,000000, artinya nilai probabilitas (*F-statistic*) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang

pendidikan dan kesehatan yang secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

		Mean dependent	15.513
R-squared	.916410	var	18
Adjusted R-squared	0.884053	S.D. dependent	1.9036
S.E. of regression	0.6482	Akaike info criterion	2.2115
Sum squared resid	13.025	Schwarz criterion	2.7386
Log likelihood	35.653	Hannan-Quinn criter.	2.4070
F-statistic	28.321	Durbin-Watson stat	1.6489
Prob(F-statistic)	0.0000		35

Sumber: Data diolah dengan Eviews 8, 2021

Koefisien determinasi (R^2) mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi data panel, yaitu merupakan proporsi persentase sumbangan X_1 , X_2 terhadap variasi (naik turunnya) Y . Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel independen semakin mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil tabel 10 menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R -squared), koefisien determinasi yang disesuaikan ($adjusted R Square$), antara lain:

1. Nilai uji koefisien determinasi (R -squared) sebesar 0.916410. Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang

pendidikan dan kesehatan sebesar 91,64% dan sisanya sebesar 8,36% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Berdasarkan pada Tabel 4.9 nilai R -squared sebesar 0.916410 termasuk kedalam kategori sangat kuat, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. $Adjusted R$ -squared sebesar 0.884053, ini menunjukkan sumbangan pengaruh variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 88,41%. $Adjusted R$ -squared digunakan karena variabel dalam penelitian lebih dari satu variabel. Hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat erat karena nilai mendekati satu.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut dapat diketahui dari data pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,8065 > 0,05$, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara parsial positif, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi memberikan arti bahwa pengambilan kebijakan anggaran pendidikan minimal 20% yang dilakukan pemerintah akan memberikan dampak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan beberapa teori yang telah disebutkan sebelumnya, diantaranya yaitu teori *human capital* bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat yang berproduksi tinggi. Investasi pendidikan mutlak sangat dibutuhkan maka dari itu, pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Kemampuan masyarakat yang semakin baik akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam mendorong kegiatan perekonomian dan mampu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Oleh karena itu, semakin besar pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan meningkatkan modal manusia untuk meningkatkan produktivitas sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Hasil penelitian pada variabel ini menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah belum cukup baik dalam penyerapan alokasi anggaran pendidikan di kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak cukup kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat belum berupaya dengan baik dalam menyediakan sarana dan

prasarana pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ladung, 2018) dan (Tjodi, Rotinsulu dan Kawung, 2018) bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pake, Kawung dan Luntungan, 2018).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut dapat diketahui dari data pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0013 < 0,05$, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi memberikan arti bahwa pengambilan kebijakan anggaran kesehatan minimal 5% yang dilakukan pemerintah akan memberikan dampak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan beberapa teori yang telah disebutkan sebelumnya, diantaranya yaitu teori *human capital* bahwa kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak akan menghasilkan suatu produktivitas bagi

negara karena modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan fasilitas publik khususnya di bidang kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan semakin tinggi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan maka semakin baik fasilitas publik dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dapat mendorong kegiatan perekonomian, sehingga mampu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari, Sarfiah dan Rusmijati, 2018) dan (Anggraeni, 2017) bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut dapat diketahui dari data pada tabel 9 yang menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan secara simultan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah bidang

pendidikan dan kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi memberikan arti bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan ekonomi dengan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, yaitu dengan menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Hal ini sesuai dengan beberapa teori yang telah disebutkan sebelumnya, diantaranya yaitu teori Peacock dan Wiseman yang menyatakan bahwa meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi besar. Dengan adanya hal ini, peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2019) dan (Septiani, 2019) bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi bernilai positif, namun tidak berpengaruh secara signifikan. Hal tersebut dapat

diketahui dari data pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,8065 > 0,05$, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan secara parsial positif, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut dapat diketahui dari data pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0013 < 0,05$, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut dapat diketahui dari data pada tabel 9 yang menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$, maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang

Pendidikan dan Kesehatan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat disampaikan diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
 - a. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terbukti positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat, sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan secara merata yang dialokasikan sebesar 20% dari APBN dan APBD, serta lebih mengoptimalkan alokasi pendidikan di kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat.
 - b. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terbukti berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat, sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran kesehatan secara merata yang dialokasikan sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas, yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lainnya yang dinilai dapat berpengaruh

terhadap variabel terikat, yaitu pertumbuhan ekonomi.

- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel, dapat memperluas wilayah penelitian, dan dapat menambah periode penelitian, sehingga hasil yang di dapat akan lebih baik dari penelitian ini.

Referensi

- Anggraeni, M. (2017). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ladung, F. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare, *Economis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia Makassar*, [online] Vol. 1. Tersedia di: <http://www.jurnalpertanianumpar.com/index.php/economos/article/view/573> [Diakses pada: 3 Juni 2020]
- Mangkoesoebroto, G. (2018). *Ekonomi Publik*. Ed. Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mankiw N, G. dan dkk. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M. V. dan Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi*, [online] Vol. 18. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/20877> [Diakses pada: 3 Juni 2020]
- Puspitasari, J. M., Sarfiah, S. N. dan Rusmijati. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode Tahun 2010-2017), *DINAMIC: Directory Journal of Economic Universitas Tidar Magelang*, [online] Vol. 1. Tersedia di: <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/441> [Diakses pada: 3 Juni 2020]
- Putri, S. A. (2019). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2011-2019*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Rahmawati, Y. O. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1995-2017, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, [online] Vol. 7. Tersedia di: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5796> [Diakses pada: 3 Juni 2020]
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003*

- Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Samuelson, P. A. dan Nordhaus, W. D. (2018). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Global.
- Septiani, N. (2019). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Pringsewu 2010-2017)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sukirno, S. (2016). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Ed. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O. dan Kawung, G. M. V. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi di Provinsi Sulawesi Utara),”*Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Sam Ratulangi*, [online] Vol. 19. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpek/article/view/32762> [Diakses pada: 3 Juni 2020]
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. (2018). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- www.jabar.bps.go.id
www.djpk.kemenkeu.go.id